

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
DI KELURAHAN GIWANGAN KAPANEWON UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA**

Rizki Tania Putri¹, Sri Utami²

¹Kantor Koordinator Kota Yogyakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) "AAN" Yogyakarta

E-mail: 1utamisriph@gmail.com

Abstract

The problems encountered in the implementation of the Bendhung Lepen program in the Giwangan Umbulharjo Village, Yogyakarta were: The local community initially disagreed with the Lepen Bendhung development plan by the Yogyakarta City Government; and Lack of awareness and concern for the local community towards the environment resulting in the creation of slum areas around river banks. Based on these problems, the researchers conducted an analysis of the implementation of the KOTAKU Program, especially the construction of Lepen Bendhung in Giwangan Umbulharjo Village, Yogyakarta. The research approach is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the implementation of the Bendhung Lepen program in the Giwangan Village has been going well. Communication between stakeholders is good and clear, supported by communication technology. The Bendhung Lepen program facilities are adequate, the abilities/skills of the implementers are in accordance with their respective roles. The appointment and attitude of the bureaucrats was quite good, supported by good views and thoughts from the lurah, while the incentives were only received by ASN up to the city coordinator. Kelurahan facilitators, BKM, and KSM as volunteers. The bureaucratic structure is good, there are SOPs nationally through the master schedule, MIS, proposals, accountability reports and audits. The distribution of responsibilities in accordance with abilities and skills, main tasks and functions has been explained in the Work Agreement, while operations are included in the Terms of Reference. The inhibiting factor, sometimes there are differences of opinion in the execution of problems due to miscommunication, but this is normal and can be resolved by deliberation.

Keywords: Program Implementation; Bendhung Lepen Program.

Latar Belakang

Tingginya kepadatan penduduk di perkotaan mengakibatkan kawasan sempadan sungai, sekitar rel kereta api, atau zona lain, menjadi kawasan permukiman baru. Hal ini mengakibatkan terbentuknya kawasan permukiman liar, yang jika tidak ditangani secara serius dan cepat berimplikasi pada meluasnya kawasan permukiman kumuh.

Permukiman kumuh disebabkan oleh ketidakteraturan tata bangunan, dan kondisi bangunan perumahan yang tidak layak. Kondisi tersebut dapat memberikan kesan kegagalan pemerintah daerah (pemda) dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat dan ketidakberdayaan pemda dalam mengatur pola tata ruang yang proporsional.

Kualitas perumahan dan kondisi permukiman di Indonesia masih menjadi problematika, akibat dari kurangnya sistem perencanaan dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, serta sistem kelembagaan penyedia sarpras permukiman yang belum memadai. Secara fungsional seharusnya pemerintah wajib menyediakan sarpras (<https://repository.uinsuska.ac.id/22575/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>).

Menurut data Kementerian PU Februari 2019, di Indonesia tercatat luas kawasan kumuh 38.481Ha (12%). 4.108Ha diantaranya kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Perpres No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 tahun 2015-2019, adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan di antaranya dilakukan melalui pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Tujuan umum Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud: (1) Memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan; dan (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemda.

RPJMD DIY tahun 2017-2022 Bab II tentang Lingkungan Permukiman Kumuh, menyebutkan: Penuntasan Program KOTAKU sebagian besar terletak di daerah sempadan sungai di Kota Yogyakarta serta beberapa titik di daerah permukiman kampung. Program perbaikan rumah dan lingkungan, sanitasi, membuka akses jalan serta melakukan revitalisasi sungai adalah program fisik untuk menata permukiman yang layak. Dengan demikian, kawasan yang sebelumnya kumuh, terutama di sekitar sungai, dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, kuliner, dan olahraga. Program Mundur, Munggah, Madhep Kali (M3K) bagi warga di sepanjang sungai serta revitalisasi kawasan sungai termasuk program penting untuk menuju kawasan KOTAKU.

Luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta per Maret 2022 seluas 114,72Ha. Pada Maret 2022 juga tercatat pengurangan kawasan kumuh sebesar 20,54Ha, ini merupakan pencapaian yang baik bagi Program KOTAKU khususnya di Kapanewon Umbulharjo. Kapanewon Umbulharjo mengalami pengurangan kawasan kumuh sebesar 7,67Ha termasuk Kelurahan Giwangan yang membangun Bendhung Lepen.

Keinginan Pemkot Yogyakarta untuk melanjutkan Program KOTAKU juga dikarenakan indeks dasar pengentasan kawasan kumuh yang telah dicapai belum mampu menunjukkan kondisi kawasan yang lebih baik untuk dipandang serta belum memberikan kenyamanan sepenuhnya bagi masyarakat, sehingga lingkungan tidak hanya harus bebas kumuh secara teknis, melainkan juga harus benar-benar bebas dari kawasan kumuh secara visual. Hal tersebutlah yang mendasari munculnya program lain sebagai upaya mengatasi permukiman kumuh, yaitu Bendhung Lepen.

Bendhung Lepen di Kelurahan Giwangan Kapanewon Umbulharjo Kota Yogyakarta ini menjadi fokus Pemkot Yogyakarta dalam Program KOTAKU. Kelurahan Giwangan khususnya kawasan Bendhung Lepen ini dipilih karena memenuhi kualifikasi kawasan kumuh Kota Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah dalam implementasi program Bendhung Lepen di Kelurahan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta sebagai berikut: (1) Masyarakat setempat pada awalnya kurang setuju terhadap rencana pembangunan Bendhung Lepen oleh Pemkot; (2) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sehingga terciptanya kawasan kumuh di sekitar bantaran sungai.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masyarakat yang awalnya kurang setuju pada pembangunan program Bendhung Lepen, seringkali terjadi *misscommunication* yang

menyebabkan para pelaksana, pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program Bendhung Lepen di Kelurahan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Penentuan informan melalui *purposive sampling*.

Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George C. Edward III. Kelebihan dari model ini adalah ke-empat indikatornya sederhana dan lebih mudah dipahami oleh peneliti untuk menganalisis implementasi program Bendhung Lepen. Implementasi Program KOTAKU di Kelurahan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta Kawasan Bendhung Lepen dianalisis selama proses yang dilakukan, dengan indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Program KOTAKU berdasarkan SK Walikota No.393 Tahun 2014 untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Yogyakarta, yang salah satunya ada di Kelurahan Giwangan Umbulharjo Yogyakarta. Kapanewon Umbulharjo, merupakan wilayah dataran rendah dilintasi oleh tiga sungai. Pembagian administrasi wilayah di Kelurahan Giwangan terdiri atas 13 RW dengan 42 RT. Pada sebelah timur terdapat Sungai Gajah Wong, sebelah tengah terdapat Sungai Belik, dan sebelah barat terdapat Sungai Code. Kapanewon Umbulharjo terletak di selatan Kota Yogyakarta, berada pada ketinggian tanah 114mdpl (BPS, Kota Yogyakarta dalam Angka 2018).

Pendidikan penduduk di wilayah Kelurahan Giwangan mayoritas SMA yang berpotensi masyarakat melek huruf dan berhitung, serta penduduk rata-rata usia produktif. Sedangkan masalah yang dihadapi ialah masih adanya pengangguran dan belum memiliki ketrampilan/pengalaman usaha. Mata pencaharian penduduknya di sektor swasta, jasa dan perdagangan seperti *laundry*, fotokopi, kuliner, warung, *homestay* dan lain-lain.

Permasalahan yang dihadapi dalam sektor mata pencaharian ialah kurangnya keterampilan untuk berwirausaha dan masih membutuhkan akses permodalan dengan syarat mudah dan ringan, akses pemasaran yang luas, serta pelatihan pengelolaan limbah. Rata-rata

pendapatan >3,5juta rupiah dengan rata-rata tanggungan 3-4 orang.

Program KOTAKU bermaksud membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kawasan kumuh. Pemda memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Program KOTAKU di Bendhung Lepen sudah berjalan sesuai dengan standarnya, walaupun masih ada kekurangan dalam implementasinya. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan implementasi program KOTAKU berdasarkan 4 indikator sesuai teori Edward III, yaitu sebagai berikut:

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi/pesan/ide/gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan/verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Salah satu komunikasi di Program Bendhung Lepen Kelurahan Giwangan adalah komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, para pelaksana kegiatan dengan pemerintah, para pelaksana dengan masyarakat, dan sebaliknya. Pada indikator komunikasi dianalisis berdasarkan 3 sub indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. Transmisi

Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik yang akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miscommunication*). Transmisi antara organisasi dengan para pemangku kepentingan harus diperhatikan dan dijaga. Komunikasi yang baik akan menjaga hubungan yang baik pula serta mendapatkan informasi dan solusi yang diinginkan. Hal ini tentunya juga berpengaruh dalam proses implementasi Program Bendhung Lepen di Kelurahan Giwangan.

Menurut Ketua BKM Giwangan, pola komunikasi yang dilakukan oleh PU melalui konsultan pendamping, meliputi beberapa tahapan dan metode yaitu sosialisasi, pelatihan, penguatan yang bersifat teknis dan non teknis, kemudian pertemuan-pertemuan rutin. Komunikasi dengan masyarakat sudah baik, dan masyarakat sangat mendukung serta berempati terhadap Program Bendhung Lepen. BKM dipilih oleh warga masyarakat, jadi untuk penyampaian informasi dari pembuat kebijakan, lalu ke BKM dan disosialisasikan kepada masyarakat dapat dengan mudah. Peran BKM betul-betul diterima oleh masyarakat.

Menurut Asisten Kota (askot), komunikasi dengan masyarakat dilakukan tiga kali dalam seminggu. Komunikasi antara askot dengan masyarakat tidak terlalu intens, karena

lebih banyak berkomunikasi dengan *stakeholder*, karena yang melakukan komunikasi langsung ialah fasilitator kelurahan (faskel) langsung turun ke lapangan. Setelah sosialisasi, ada penguatan kelembagaan yaitu BKM selanjutnya ke masyarakat untuk menjelaskan penanganan masalah, misalnya tentang kualitas permukaan jalan dan sanitasi.

Menurut Askot transmisi sangat baik dan masyarakatnya juga mendukung Program Bendhung Lepen, Awalnya masyarakat tidak percaya bahwa program ini dapat menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar bantaran sungai, dan tidak percaya bahwa bisa meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni serta berkelanjutan.

Menurut faskel, transmisi komunikasi dengan masyarakat berjalan baik, masyarakat senang dengan adanya Program Bendhung Lepen, karena SDM pelaku UMKM di sekitar bantaran sungai menjadi lebih berkualitas. Pendapat tersebut diperkuat oleh Ketua PKK, ibu-ibu di sekitar bantaran sungai membuka gerai makanan dan minuman untuk meningkatkan perekonomian mereka. Selain itu mereka juga membantu untuk menjaga kebersihan setempat, karena Bendhung Lepen dari awal diresmikan sampai sekarang berdampak pada meningkatnya kedatangan pengunjung. Transmisi komunikasi antara fasilitator dengan masyarakat biasanya dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) di Kantor Koordinator Kota (Korkot), atau ketika tim fasilitator berkunjung ke lapangan dengan cara tatap muka. Selain itu juga berkomunikasi via *whatsapp*, tidak melalui *email* yang formal.

Menurut Ketua KSM, masyarakat sangat mendukung program Bendhung Lepen. Dengan adanya KSM ini permasalahan seperti limbah, IPAL, drainase teratasi. Beberapa ketua RT menjelaskan bahwa komunikasi transmisi antara masyarakat dengan tokoh masyarakat dilakukan dengan pertemuan yang diselenggarakan oleh BKM, setiap dua-tiga kali dalam seminggu. Komunikasi dengan para pelaksana berjalan baik tidak ada masalah. Biasanya masyarakat mendapatkan informasi dari pengurus RT/RW setempat.

Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transmisi komunikasi antara berbagai pihak yang terkait dengan program Bendhung Lepen di Kalurahan Giwangan sudah berjalan baik. Ada pertemuan rutin 2-3 kali dalam seminggu, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang tujuan dan manfaat program Bendhung Lepen di Kalurahan Giwangan.

2. Kejelasan

Kejelasan adalah komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

Kejelasan komunikasi dalam implementasi menjadi hal yang harus diperhatikan, karena berhubungan dengan upaya memperlancar interaksi antar individu. Komunikasi antara pihak PU dengan para pelaksana kebijakan program Bendhung Lepen harus jelas dan transparan.

Menurut Ketua Bidang Permukiman dan Wilayah Dinas PUPR, pola komunikasi antara para pelaksana program Bendhung Lepen berupa sosialisasi, pelatihan, dan pertemuan yang diinisiasi masyarakat itu sendiri. Pola komunikasi ke masyarakat melalui kunjungan, evaluasi, kemudian diskusi jika ada keluhan dan masukan. Ketua BKM Giwangan menyampaikan bahwa kejelasan komunikasi BKM dengan RT/RW baik, sesuai dengan harapan mereka, dan mereka juga mendukung program ini. Penyampaian informasi melalui rapat/rembug warga dalam waktu seminggu sekali atau bahkan lebih. Biasanya pembahasan dalam rapat ini tentang pembangunan-pembangunan apa saja dan akan ada penambahan fasilitas apa untuk kesejahteraan masyarakat.

Askot menyatakan bahwa komunikasi antara askot dengan tim faskel sangat jelas. Penyampaian informasi/komunikasi disampaikan sebaik-baiknya agar tidak terjadi salah persepsi antar individu. Rakor guna menyampaikan masukan dan saran untuk proses implementasi atau masalah-masalah apa saja yang terjadi di lapangan. Tim faskel, korkot dan askot bekerja sama dan mencari solusi dalam menangani masalah yang terjadi di lapangan. Perbedaan pendapat sering terjadi ketika rakor berlangsung, itu hal yang wajar.

Menurut Askot Infrastruktur, kejelasan komunikasi antara askot dengan faskel dilakukan dengan rakor. Untuk langkah pertama melihat data *baseline*, yaitu data lokasi yang tercatat setiap ada kerusakan, peningkatan kualitas, atau pengadaan fasilitas yang harus diperbaiki. Langkah kedua dilakukannya penguatan kelembagaan untuk BKM sebagai penggerak masyarakat. Kemudian *On the Job Training* (OJT) diselenggarakan oleh pemkot untuk memfasilitasi masyarakat dalam teknik-teknik dan tata cara memasang *coneblock* dan harapannya pada setiap kegiatan/pelatihan yang diberikan pemerintah, masyarakat paham akan teknik maupun tata cara/prosedurnya.

Menurut Askot, kejelasan komunikasi antar tim fasilitator dengan askot berawal dari perencanaan. Pertama tim fasilitator melakukan pemaparan setiap minggunya, pemaparan perihal permasalahan di lapangan seperti drainase, limbah, sanitasi dan lain-lain. Dalam rakor ini tim korkot memberi masukan dan saran, jika semuanya setuju atas saran yang diberikan, maka tim korkot, fasilitator dan BKM langsung membuat proposal. Kemudian rakor, dan tim fasilitator melakukan pemaparan, diberikan masukan dan saran oleh tim korkot. Jadi setiap melangkah tim fasilitator harus berkomunikasi dahulu dengan tim korkot yang meliputi

korkot dan askot, agar setiap kebijakan yang diambil berhasil baik sesuai harapan.

Menurut faskel, kejelasan komunikasi antar faskel dengan askot bagus dan lancar, melalui rakor setiap seminggu sekali, serta melalui Kelompok Belajar Internal Kelompok (KBIK), merupakan rapat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menyampaikan informasi dan membagikan ilmu pengetahuan. KBIK diselenggarakan di tempat wisata, jadi semua tim sekalian menikmati suasana yang berbeda dibandingkan dengan rapat-rapat yang diselenggarakan di kantor.

Selain itu, jika askot membutuhkan data, materi dan lain-lain, askot langsung menghubungi via *whatsapp* ke fasilitator bersangkutan karena faskel tidak satu gedung dengan kantor askot dan Korkot. Jika ada informasi penting yang akan disampaikan biasanya melalui rapat via zoom, biasanya rapat antara tim korkot, faskel, dan PU.

Menurut Ketua RT setempat, bahwa kejelasan komunikasi antara Ketua RT dengan para pelaksana tidak ada kendala. Jika ada informasi yang akan disampaikan, dapat melalui *whatsapp* atau membuat jadwal agenda pertemuan. Kecuali jika informasi yang disampaikan harus diberitahukan untuk semua warga, maka harus melalui sosialisasi/rapat yang diselenggarakan di balai desa.

3. Konsistensi

Konsistensi adalah tetap (tidak berubah-ubah), tetap selaras atau sesuai. Dalam implementasi kebijakan harus *ajeg*, tidak berubah-ubah. Seseorang yang menerima informasi biasanya akan menselaraskan informasi sebelumnya dibandingkan dengan informasi baru yang diterima. Konsistensi komunikasi dalam implementasi program kegiatan berupa penyampaian informasi yang tetap/tidak berubah-ubah. Konsistensi komunikasi dimaksudkan bahwa informasi harus selaras dan sesuai agar tidak menimbulkan *misscommunication*.

Konsistensi komunikasi dalam implementasi pada Program Bendhung Lepen ini dimaksudkan jika para pelaksana menerima informasi dari pembuat kebijakan, mereka akan menyelaraskan dan membandingkan dengan informasi yang diterima sebelumnya. Jika itu tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, para pelaksana dapat berargumen untuk menyampaikan pendapat lainnya agar kedua pihak saling menguntungkan.

Konsistensi komunikasi antara KSM dengan para pelaksana Program Bendhung Lepen sudah baik, karena mereka saling berkolaborasi. Jika ada individu menilai informasi yang diterimanya kurang tepat, maka individu itu menyampaikan pendapatnya kepada para pelaksana lainnya. Jika harus menemukan solusinya, maka pengambilan keputusan harus

tepat tanpa merugikan salah satu pihak. Komunikasi antara askot dengan faskel biasanya dilakukan melalui rapat yang telah diagendakan, dan dibuka kesempatan untuk peserta rapat menyampaikan saran/masukan. Jika ada masalah, maka solusi juga disampaikan ketika rapat berlangsung.

Berdasarkan uraian tentang indikator komunikasi, komunikasi antara para pelaksana dengan pemerintah, antara para pelaksana dengan masyarakat, antara para pelaksana dengan tukang, sudah didukung dengan teknologi yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kadang masih terjadi *misscommunication* dengan masyarakat, kadang terjadi perbedaan pendapat dalam eksekusi masalah.

Sumber Daya

Pada indikator sumber daya, dianalisis berdasarkan sub indikator staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi/memadai, atau pun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya ialah sarana yang merupakan kebutuhan untuk menjalankan program agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program secara efektif dan efisien. Pengaruh sumber daya pada perencanaan dan pelaksanaan program Bendhung Lepen, meliputi perencanaan sumber daya yang baik sesuai dengan kebutuhan logis program, sehingga akan membantu pencapaian sasaran dan tujuan program secara maksimal.

Staf/pelaksana kebijakan dalam program Bendhung Lepen wajib memenuhi kualifikasi atau standar yang ditentukan oleh program. Program ini perlu dilaksanakan dengan kemampuan dan keterampilan yang handal di bidangnya. Salah satunya kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan seperti BKM, askot, fasilitator dan lain-lain.

Ketua Sub Bidang Permukiman Dan Wilayah Dinas PUPR mengatakan bahwa kategori dan kemampuan staf sesuai dengan kualifikasi masing-masing peran. Misal koordinator di tingkat provinsi *team leader* dia fungsinya mengendalikan dan membangun komunikasi serta koordinasi pada setiap kota/kabupaten. Kategori dan kualifikasi

pendamping dinilai berdasarkan lamanya bekerja, pengalaman yang diutamakan dan *skill* yang mendukung. Kemampuan dan keterampilan para pelaksana sudah sesuai standar dan menjalankan sesuai tupoksi masing-masing. Jika ada permasalahan, maka BKM dan para pelaksana lainnya melakukan diskusi dan saling memberikan solusi yang terbaik. Di samping itu pengambilan keputusan juga harus mempertimbangkan keputusan bersama.

Kemampuan dan keterampilan para pelaksana saling mengisi atau saling membantu dalam segala hal. Jika salah satu pelaksana membutuhkan bantuan, maka para anggota lainnya siap membantu dalam menyelesaikan masalahnya.

2. Informasi

Informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua bentuk, pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor wajib mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan/regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Informasi yang disampaikan harus benar, jelas, dan tidak berubah-ubah seperti halnya informasi mengenai pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan dan sosialisasi dalam program Bendhung Lepen harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. PU berperan penting ketika memberikan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan-penguatan.

Ketua Sub Bidang Permukiman dan Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY mengatakan bahwa pelatihan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam Program Bendhung Lepen ini yaitu pelatihan terstruktur, sosialisasi dan pertemuan yang bersifat inisiatif. Jika masyarakat kurang paham, maka akan dilakukan diskusi dan pendekatan secara teknis, karena pelatihan yang terlalu formal oleh pemerintah justru akan berdampak masyarakat kurang paham.

Ketua BKM menambahkan bahwa pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh program Bendhung Lepen terkait Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu mendesain, menghitung kebutuhan biaya, dan membuat pelaporan. Para pelaksana dan tenaga kerja di lapangan sudah memenuhi standar, baik dalam upah maupun jam kerja, dan setiap minggu KSM wajib menyampaikan laporan terkait proses hasil kerja setiap minggu, termasuk jumlah pelaksana dan tenaga kerja, apakah bekerja tepat waktu, honor menyesuaikan atas kinerjanya, dan setiap minggunya harus ada laporan terbaru mengenai kemajuan yang berlangsung.

3. Wewenang

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan seorang pemegang jabatan yang berhak mengambil keputusan/kebijakan. Dalam mengambil keputusan/kebijakan harus efektif dan efisien guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Seperti halnya di Program Bendhung Lepen ini, para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan sesuai dengan aturan pemerintah, sedangkan para pelaksana dalam mengambil keputusan/kebijakan atas persetujuan bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman/ ketidakadilan.

Ketua Sub Bidang Permukiman dan Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY mengatakan bahwa tugas dan wewenang sudah tercatat di Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Master Schedule*, jadi peran para pelaksana karkot sehubungan dengan kebijakan tidak lepas dari pemda, tim fasilitator tidak lepas dari kelurahan, RT/RW dan lain-lain. Jadi koordinasi itu dibangun ketika ada persoalan yang harus diselesaikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ketua BKM mengatakan bahwa tugas dan wewenang BKM yaitu mengelola dana BOP, membentuk KSM, mengkoordinir KSM dalam melaksanakan pembangunan, menjadi penyalur/penghubung antara pemerintah dengan KSM. Jadi pergerakan BKM dan KSM harus bersamaan dan berkontribusi terhadap semua hal yang akan dijadikan keputusan. Tugas KSM menjalankan proposal yang diajukan oleh masyarakat atas anjuran BKM. Jadi KSM bekerja sama dengan BKM dan faskel agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarpras), maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Keberhasilan implementasi salah satunya dipengaruhi dari fasilitas pendukung. Jika fasilitas pendukung (sarpras) baik, maka implementasi kebijakan tersebut akan berhasil. Menurut Ketua Sub bidang permukiman dan Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY, bahwa fasilitas dalam program Bendhung Lepen yaitu fasilitas pembiayaan dari program itu sendiri, dan penghargaan yang diberikan bagi desa/kelurahan yang dianggap baik yang berpotensi memunculkan kemandirian. Kemandirian yang dimaksud yaitu desa/kelurahan yang berkembang segi perekonomian dan lain-lain, tanpa adanya permintaan dana dari berbagai pihak.

Ketua BKM mengatakan bahwa fasilitas program Bendhung Lepen ini termasuk

kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan Biaya operasional (BOP). Fasilitas yang diberikan ini mendukung berjalannya program dengan lancar. Sedangkan Ketua KSM mengatakan bahwa fasilitas program Bendhung Lepen ini seperti akses jalan yang dibuatkan jalan tembus, mudah dilewati dan terawat, limbah yang dahulu masuk ke area irigasi dan Bendhung Lepen, sekarang sudah dibuatkan IPAL.

Berdasarkan deskripsi tentang fasilitas dalam program Bendhung Lepen di atas, fasilitas yang mendukung implementasi: (a) Kemampuan dan keterampilan para pelaksana sudah sesuai dengan perannya masing-masing; (b) Pemberian Pelatihan dan sosialisasi sudah maksimal dengan fasilitas yang lengkap; (c) Tugas dan wewenang dapat berjalan sesuai SOP; (d) Fasilitas program sudah memadai; (e) Adanya peningkatan perekonomian masyarakat sekitar bantaran sungai; (f) Kerjasama antara pengurus dengan tokoh masyarakat membuat ide budidaya ikan di saluran irigrasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: (a) Adanya pola pikir beberapa anggota masyarakat yang masih awam; (b) Perekonomian sebagian anggota masyarakat yang masih relatif rendah.

Disposisi

Disposisi merupakan keinginan/kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi juga dapat berupa watak/karakteristik pelaksana kebijakan. Watak/karakteristik setiap individu berbeda-beda. Berikut peneliti deskripsikan indikator disposisi, dengan sub indikator pengangkatan birokrat, dan insentif:

1. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat berhubungan dengan watak/karakter SDM. Jika para pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi, maka sangat menghambat proses implementasi. Oleh karenanya, pemilihan/pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus benar-benar orang yang berkompeten dalam bidangnya, agar tujuankebijakan dapat diwujudkan.

Ketua Sub Bidang Permukiman dan Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY mengatakan bahwa sikap para birokrat program Bendhung Lepen itu bagus. Lurah Giwangan dapat memahami program, kemudian membumi dengan implementasi, sehingga masyarakat juga merasa senang. Pemkot melalui Bidang Perumahan juga bagus inisiatifnya, memiliki sifat pemberani, sehingga mereka dapat mengembangkan banyak program. Kemudian pemkot melalui sekda, kepala Bappeda, kepala PU juga cukup baik.

Jika dilihat dari pendampingan konsultatif melalui karkot, BKM dan lain-lain, jelas itu merupakan bagian dari kewajiban program. Kalau di BKM terbatas, hal-hal yang bersifat substantif pemberdayaan. Berhubung kepala BKM mudah memberikan masukan dan lain-lain, itu mempermudah untuk mengambil keputusan, sehingga tidak ada sekat struktur, semua fokus membangun substansi di masyarakat. Pemkot membangun swadaya sendiri untuk memfasilitasi program ini, salah satunya adalah infrastruktur rumah yang tidak dibiayai oleh PKP melalui program Bendhung Lepen, namun difasilitasi oleh Pemkot melalui perbaikan RTLH, dan Pemkot banyak membiayai ratusan rumah pinggir sungai di Kota Yogyakarta menggunakan APBD.

Ketua BKM mengatakan bahwa sikap para birokrat program Bendhung Lepen selalu memantau serta mengevaluasi kinerja para pelaksana. Ketua KSM mengatakan bahwa sikap para birokrat mendukung proses implementasi program Bendhung Lepen. Dalam monev, para birokrat menyampaikan langsung kepada BKM atau para pelaksana di lapangan, tentang evaluasi proses implementasi dan hasilnya. Evaluasi juga disampaikan melalui buku komunikasi yang dipersiapkan khusus untuk menampung masukan/saran.

2. Insentif

Insentif merupakan teknik yang disarankan untuk diberikan kepada para pelaksana kebijakan, agar para pelaksana melaksanakan perintah dengan baik. Para pelaksana kebijakan akan lebih semangat dalam menjalankan tugasnya dan meningkatkan kualitas kinerja. Dalam program Bendhung Lepen tidak semua pelaksana kebijakan menerima insentif, hanya para pelaksana tertentu dan memenuhi kualifikasi yang menerimanya.

Ketua Sub Bidang Permukiman dan Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY mengatakan bahwa insentif PU sudah ditentukan melalui gaji ASN, sedangkan untuk konsultan menyesuaikan jenjang dan pola pendampingan. Sedangkan di level BKM ke bawah tidak menerima insentif, dikarenakan mereka relawan dan tidak tertulis secara normatif.

Ketua BKM mengatakan bahwa insentif tidak ada untuk BKM dan perangkat lain ke bawah seperti lurah, ketua RT/RW, serta pengurus. Tetapi jika ada sisa BOP, biasanya digunakan untuk kebersamaan, liburan atau keperluan lainnya yang lebih penting. Askot infrastruktur mengatakan bahwa insentif yang diberikan sudah diperhitungkan oleh PU untuk karkot, askot, faskel berdasarkan keahlian masing-masing. Sedangkan di tingkat BKM dan KSM tidak dapat insentif, karena mereka dibentuk/dipilih oleh warga, dan untuk warga.

Faskel mengatakan bahwa insentif di tingkat faskel tidak ada, jadi semua sama hanya mendapatkan gaji. Ketua KSM mengatakan bahwa mengenai insentif hanya diakhir, misalnya

dari bahan bangunan seperti pipa, pasir dan lain-lain yang tidak terpakai itu dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Jadi insentif yang diberikan ini tidak berbentuk uang, melainkan berbentuk volume pekerjaan. Pengurus Bendhung Lepen mengatakan bahwa tidak mendapatkan insentif. Insentif hanya berasal dari makanan/ minuman dari warga, misal ada perbaikan fasum/gotong royong yang dilakukan setiap minggu.

Berdasarkan indikator disposisi disimpulkan; (1) Sikap para birokrat sudah cukup baik didukung dengan adanya pandangan dan pemikiran yang baik dari lurah dan perangkat lainnya; (2) Kerjasama antara pengurus dengan tokoh masyarakat membuat ide budidaya ikan di saluran irigrasi; (3) Insentif diterima oleh ASN sampai korkot saja, sedangkan faskel, BKM, dan KSM tidak menerima insentif dikarenakan sebagai relawan.

Struktur Birokrasi

1. *Standar Operating Procedures (SOP)*

SOP memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan standar yang telah ditetapkan. Seperti halnya Program Bendhung Lepen menetapkan SOP yang dibutuhkan para pelaksana kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan harus memenuhi kualifikasi standar yang telah ditetapkan, misalnya pendamping sosial di lapangan harus dapat berkomunikasi serta berkontribusi terhadap masyarakat. Ketua Sub bidang permukiman dan Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY mengatakan bahwa SOP para pelaksana program Bendhung Lepen semua sudah diperhitungkan secara nasional melalui *master schedule*, SIM, proposal, laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta di akhir melakukan audit setiap tahun oleh BPKP.

Ketua BKM mengatakan bahwa SOP dilakukan secara musyawarah oleh perangkat-perangkat desa, dengan tujuan agar lembaga masyarakat sama-sama bekerja sesuai SOP, tidak timbul perbedaan pendapat. Ketua KSM mengatakan bahwa SOP sudah sesuai dalam segi jam kerja dan upah yang diberikan. Jika ada pekerja yang lembur maka dihitung 1 hari. Pekerjaan yang dilakukan pada malam hari ini dikarenakan berada di depan rumah warga. BKM dan KSM mensosialisasikan dan mengadakan rapat untuk membahas pekerjaan yang kemungkinan menghambat aktivitas masyarakat beberapa hari ke depan, sebelum dilakukannya lembur harus meminta izin kepada warga yang terganggu untuk akses jalannya.

Pengurus Bendhung Lepen mengatakan bahwa SOP dibentuk secara musyawarah dan kebersamaan antara BKM, KSM, dan perangkat lainnya, agar pekerjaan dilakukan dengan senang dan tidak ada point SOP yang memberatkan salah satu pihak.

2. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan/aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Seperti halnya tanggungjawab kegiatan para pelaksana Program Bendhung Lepen, tanggungjawabnya terbagi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dalam bidangnya.

Ketua Sub bidang permukiman dan Wilayah di Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY mengatakan bahwa tupoksi sudah dijelaskan di Surat Perjanjian Kerja (SPK), sedangkan operasionalnya termasuk di Kerangka Acuan Kerja (KAK). Jadi semua aturan dan tupoksi sudah terbagi dalam ketentuan masing-masing. Tupoksi sudah tertata, misalnya bendahara bertugas untuk mengambil uang di bank, kemudian bersama seksi belanja alat bangunan. Pengurus Bendhung Lepen hanya bertugas untuk menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, jadi masyarakat ikut serta mendukung implementasi program Bendhung Lepen di Kelurahan Giwangan.

Berdasarkan penjelasan struktur birokrasi disimpulkan; (1) SOP para pelaksana program Bendhung Lepen semua sudah diperhitungkan secara nasional melalui *master schedule*, SIM, proposal, laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta di akhir program melakukan audit.; (2) Penyebaran tanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan, tupoksi sudah dijelaskan di Surat Perjanjian Kerja (SPK), sedangkan operasionalnya termasuk di Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian analisis yang dilakukan tentang Implementasi Program Bendhung Lepen di Kelurahan Giwangan dapat disimpulkan bahwa program sudah berjalan dengan baik. Adapun analisis setiap indikator dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Komunikasi antara para pelaksana dengan pemerintah, para pelaksana dengan masyarakat, para pelaksana dengan tukang, sudah baik dan jelas, didukung dengan teknologi (*whatsapp*, *zoom*). Sedangkan faktor penghambatnya, kadang terjadi *misscommunication* dengan warga masyarakat, terjadi perbedaan pendapat dalam eksekusi masalah, namun hal itu wajar dan dapat diselesaikan dengan musyawarah.
2. Fasilitas dalam program Bendhung Lepen sudah memadai: (a) Kemampuan/keterampilan para pelaksana sudah sesuai dengan perannya masing-masing; (b) Pemberian pelatihan dan sosialisasi sudah optimal dengan fasilitas lengkap; (c) Tugas dan wewenang dapat berjalan sesuai SOP; (d) Fasilitas program sudah memadai; (e)

Kerjasama antara pengurus dengan tokoh masyarakat membuat ide pemberdayaan ikan di saluran irigrasi.

3. Berdasarkan indikator disposisi, (a) Pengangkatan dan sikap para birokrat sudah cukup baik didukung dengan adanya pandangan dan pemikiran yang baik dari lurah dan perangkat lainnya; (b) Kerjasama antara pengurus dengan tokoh masyarakat membuat ide budidaya ikan di saluran irigrasi; (c) Insentif diterima oleh ASN sampai korkot saja, sedangkan faskel, BKM, dan KSM tidak menerima insentif dikarenakan sebagai relawan.
4. Struktur birokrasi sudah baik: (a) SOP para pelaksana program Bendhung Lepen semua sudah diperhitungkan secara nasional melalui *master schedule*, SIM, proposal, laporan pertanggungjawaban (LPJ), serta di akhir program melakukan audit; (b) Penyebaran tanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan, tupoksi sudah dijelaskan dalam SPK, sedangkan operasionalnya termasuk dalam KAK.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran berikut:

1. Perlu diadakannya komunikasi yang sesuai dengan tingkat pendidikan/pemahaman masyarakat agar lebih memahami program pembangunan yang diagendakan pemkot.
2. Perlu pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar Bendhung Lepen. Seperti pelatihan budidaya ikan, pengolahan sampah organik, daur ulang sampah yang masih dapat menjadi sumber penghasilan. .
3. Perlu adanya *reward* bagi kawasan yang senantiasa bersih dan kreatif, agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya terhindar dari permukiman kumuh dan menjadi kampung percontohan.

Daftar Pustaka

- Butar-Butar, Debora, Catherine. 2012. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuhdi Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi. Jurnal Teknik POMTIS Vol.1 No.1.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grafindo Persada,
- Islamy, Irfan. Prof, 2007. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kurniawan, Kufi. 2011. *Alternatif Penataan Permukiman Kumuh Kota Malang Perspektif Stakeholder*. Skripsi Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex media komputindo. Sadyohutomo. 2008. *Manajemen Kota da Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. Wirastami, Abdi. 2017. *Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Gramedia pustaka.

<https://jogjakota.bps.go.id/publication/2021/09/24/14cb2da1bb63f70c09f97efb/kecamatan-umbulharjo-dalam-angka-2021.html> Diakses 01 September 2022 pukul 22:48 wib).

(<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/2/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>) diakses 01 September 2022 pukul 22.15 wib).

www.bps.go.id (Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta dalam Angka 2018) diakses 1 September pukul 21.28 wib).

<https://www.google.com/search?q=implementasi+program+kotaku&sxsrf=.google.com>